

TINJAUAN HISTORIS PENGARUH PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM TERHADAP KERAJAAN BIMA SUMBAWA (1620-1640M)

Ida Nuryani, Maskun dan Syaiful, M

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: herrpotter@yahoo.co.id

Hp. 085789776371

This study aimed to find the influence of the development of Islam against the Kingdom of Bima in politics. The method used in this study is the historical method. Data collection technique is the technique of literature and documentation techniques, the data analysis technique is a qualitative data analysis technique. From the research that has been done the effect of the development of Islam in the kingdom of Bima, the kingdom of Bima has improvements and adjustment of the system of government, establishment of cooperation between the Kingdom and the way to the Kingdom of Gowa, Kingdom of Bima kingdom also sought to expand the area of Islamic religious.

Penelitian ini ditujukan untuk mencari pengaruh dari perkembangan agama Islam terhadap Kerajaan Bima dalam bidang politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, teknik analisis datanya merupakan teknik analisis data kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaruh dari perkembangan agama Islam di kerajaan Bima adalah Kerajaan Bima melakukan penyempurnaan sistem pemerintahan, terjalannya kerjasama antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Bima juga berusaha memperluas wilayah penyiaran agama Islam.

Kata kunci : agama islam, kerajaan bima, pengaruh

PENDAHULUAN

Kerajaan Bima merupakan Kerajaan Islam yang terdapat di Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Bima ini merupakan kerajaan yang sangat menjunjung tinggi agama Islam. Agama Islam telah menjadi urat nadi dan darah daging bagi masyarakat Kerajaan Bima. Dalam kehidupan yang Islami tersebut, munculah ikrar setia pada Islam hal ini dikemukakan oleh Zainudin bahwa dalam “kehidupan Kerajaan Bima yang islami munculah ikrar setia pada Islam yang berbunyi “ *Mori ro made na Dou Mbojo ede kai hukum Islam-ku* “ yang berarti hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam” (Zainudin, 2011:1). Ikrar ini sangat dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Kerajaan Bima. Selain ikrar yang menunjukkan kesetiaan Kerajaan Bima akan agama Islam, Juga terdapat Bo

Kerajaan Bima atau kronik Bima yang di dalamnya memuat sejarah lokal Kerajaan Bima, Henri Chambert Loir mengemukakan bahwa:

Historiografi Bima dalam arti keseluruhan teks tentang sejarah lokal, tertulis dalam bahasa Melayu sejak pertengahan abad ke-17 dan mempunyai keistimewaan dibandingkan tradisi Melayu umum, yaitu adanya serangkaian buku catatan seperti Bo' ini, yang merupakan sejenis arsip lokal, dimana terekam segala jenis peristiwa, akta, kisah, dan piagam serta undang-undang, yang bertalian dengan sejarah dan administrasi kerajaan, struktur masyarakat, hukum, agama dan berbagai sifat lain dari kehidupan sosial dan budaya (Henri Chambert Loir, 2010:10).

Kedatangan agama Islam di kepulauan Indonesia tidaklah dalam waktu yang bersamaan. Agama Islam ini dibawa oleh para

pedagang yang singgah di kepulauan Indonesia. Pada mulanya pada saat agama Islam datang masyarakat telah memiliki peradaban yang berpedoman dari pengaruh dari kebudayaan Hindu-Budha. Awalnya perkembangan agama Islam mengalami kesulitan yang dikarenakan terhambat oleh kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, namun lama kelamaan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya semakin melemah, hal ini memberi keuntungan untuk semakin meluasnya perkembangan agama Islam di Indonesia.

Ajaran agama Islam ini dapat cepat diterima oleh masyarakat Indonesia dikarenakan ajaran agama Islam menawarkan gaya hidup yang lebih maju dari peradaban yang sebelumnya. Dengan kedatangan agama Islam masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat kota, seperti yang diungkapkan oleh Uka Tjandrasasmita bahwa: Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia dan India yang diperkirakan pada abad ke-7 M, ketika itu Islam di Timur Tengah mulai berkembang keluar Jazirah Arab. Agama Islam ini kemudian semakin menyebar keseluruh dunia yang salah satunya ke Indonesia.

Adapun tujuan mereka berlayar hanya untuk berdagang. Dari Timur Tengah para pedagang berlayar kearah Timur melintasi Laut Arab, Teluk Oman, Teluk Persia dan singgah di Gujarat terus ke Teluk Benggala atau langsung ke Selat Malaka, kemudian ke Timur ke Cina atau sebaliknya dengan menggunakan angin musim untuk pelayaran pulang pergi (Uka Tjandrasasmita, 1999:122).

Agama Islam masuk ke Nusa Tenggara Barat dibawa oleh mubaligh dan pedagang dari tanah Jawa. Setelah menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok maka selanjutnya penyebaran agama Islam berlanjut ke Pulau Sumbawa. Salah satu tujuan dari penyebaran agama Islam ini adalah ke Kerajaan Bima. Bambang Suwondo berpendapat bahwa "Kira-kira pada awal abad ke-16 Sumbawa Tengah dan Timur mendapat pengaruh Islam setelah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menganut agama Islam, ketika agama Islam di bawa oleh Sunan Prepen dari Giri ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa" (Bambang Suwondo, 1977:58).

Kerajaan Bima berpusat di Bima. Kerajaan Bima oleh masyarakat setempat dinamakan Mbojo. Kerajaan Bima ini dilihat dari letak geografisnya sangat strategis, sehingga pada masa-masa perkembangannya memegang peranan penting baik sebagai pusat perkembangan agama. Agama Islam masuk ke Kerajaan Bima kira-kira pada awal abad ke-16 Menurut Sejarahwan M. Hilir Ismail, bahwa "Tahun 1540 M merupakan tonggak awal kedatangan Islam di tanah Bima.

Proses islamisasi itu berlangsung dalam tiga tahap yaitu periode kedatangan Islam tahun 1540 – 1621, periode pertumbuhan Islam tahun 1621-1640 M, dan periode kejayaan Islam pada tahun 1640 – 1950 M. pada tahap awal sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk di wilayah-wilayah pesisir Bima" (M. Hilir Ismail, 2004:47).

Setelah kedatangan agama Islam ke Kerajaan Bima, yang berperan penting dalam pengislamisasian Kerajaan Bima adalah orang-orang Makassar yang melakukan ekspedisi pada awal abad ke-17, hal ini juga didukung oleh pendapat dari Noorduyn bahwa "Agama Islam dibawa oleh orang-orang Makassar. Sejak itu pula pengaruh politik dan budaya Gowa menjadi dominan" (J.Noorduyn, 1987:317-319). Kerajaan Gowa melakukan 4 kali ekspedisi militer ke Kerajaan Bima. Setelah ekspedisi yang dilakukan Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bima maka agama Islam berkembang di Kerajaan Bima.

Perkembangan agama Islam ini membawa perubahan bagi Kerajaan Bima, wilayah kekuasaan Kerajaan Bima terbentang luas dari Pulau Satonda di sebelah Barat sampai Alor Solor sebelah Timur, selain itu terjalinnya hubungan politik dan ekonomi antara Kerajaan Bima dengan kerajaan-kerajaan suku Bugis-Makasar dan kerajaan suku Mandar. Sistem pemerintahan disempurnakan dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Pelayaran dan perniagaan pun berkembang dengan pesat. Kapal dan perahu ditingkatkan jumlah dan mutunya. Keamanan kerajaan semakin di tingkatkan dengan memperbaharui angkatan darat dan laut sehingga Kerajaan Bima menjadi pusat

perniagaan yang ramai di wilayah Nusantara bagian Timur.

Pertanian dan peternakan dikembangkan dan diperluas, tanah yang tidak cocok untuk pertanian dipergunakan untuk daerah peternakan. Bidang sastra dan seni budaya mengalami perkembangan yaitu dengan memperkenalkan aksara yang di pelajari dari Gowa yang kemudian menjadi aksara Mbojo Bima selain itu juga terdapat syair-syair berbahasa Melayu yang menceritakan sejarah Kerajaan Bima.

Seiring dengan perkembangan Bima sebagai kota Bandar dan kota pusat pemerintahan, maka heterogenitas penduduknyapun semakin tinggi. Di Bima berdatangan para pedagang dari berbagai daerah dan berbagai bangsa, sebagian di antaranya tinggal menetap dan membangun perkampungan mereka menurut kelompok etnis maupun profesi (Tawalinuddin Haris, 1997:51).

Masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Bima ini telah membawa perubahan-perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan di Kerajaan Bima. Perkembangan agama Islam telah membawa perubahan bagi Kerajaan Bima tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya. Hal inilah yang kemudian membawa Kerajaan Bima menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara bagian Timur khususnya pada abad 15 M.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan faktor yang penting dalam menunjang penelitian yang kita lakukan. Metode ini dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah yang penulis coba selesaikan, selain itu juga ikut membantu keberhasilan dalam penelitian. Menurut Winarno Surachmad “ metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu” (Winarno Surachmad, 1995:21). Metode penelitian historis menurut Muhammad Nazir (1983:55) adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan

menimbang secara cakup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

Menurut Nugroho Notosusanto yang dimaksud dengan metode historis adalah: “Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis dimaksud untuk memberi secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya, biasanya dalam bentuk tertulis” (Notosusanto,1986:10). Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menempuh penelitian ini adalah: Heuristik (kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau), Kritik (menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik isi maupun bentuknya), Interpretasi (menentukan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh itu), Historiografi (menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah) (Notosusanto, 1986:36). Menurut Mohammad Nasir variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Mohammad Nasir, 1983:149). Sedangkan menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan variabel adalah obyek suatu penelitian atau segala sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsini Arikunto, 1989:91). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Tunggal, dengan penelitian yang berpusat pada pengaruh perkembangan agama Islam dalam bidang politik terhadap Kerajaan Bima.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Oleh karena dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah maka kegiatan studi pustaka atau teknik kepustakaan ini menjadi sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif (Nawawi, 1993:133). Melalui tehnik kepustakaan ini, peneliti berusaha mencari data melalui buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan

masalah yang akan penulis teliti dan kemudian melalui buku dan literatur tersebut penulis mencoba menelaah agar penulis dapat memperoleh data-data dan informasi yang akan penulis teliti yaitu berupa pengaruh dari perkembangan agama Islam dalam bidang politik terhadap Kerajaan Bima.

Menurut Suharsini Arikunto teknik dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Suharsini Arikunto, 1989:188). Sedangkan menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Hadari Nawawi, 1993:134). Jadi dalam melakukan pengumpulan data tidak hanya menggunakan bahan-bahan berupa literatur atau buku-buku yang ada di perpustakaan tetapi juga peneliti harus mencari bukti-bukti atau sumber-sumber yang lain berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau arkeologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu pengaruh perkembangan agama Islam dalam bidang politik terhadap Kerajaan Bima.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif lebih memudahkan peneliti untuk mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat serta memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat (Miles dan Huberman, 1992:77).

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan hasil dari pemikiran atau opini penulis terhadap segala sumber yang telah di dapat dan kemudian akan mempermudah peneliti untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Pada dasarnya proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Di bawah ini merupakan tahap tahap dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:28) meliputi:

1. Reduksi Data

Yaitu merupakan bentuk analisis data yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan.

2. Penyajian Data

Yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

Yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya.

Secara rinci tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah

1. Melakukan pengumpulan data dan kemudian melakukan penganalisisan data yang diperoleh yang terkait dengan pengaruh perkembangan agama Islam dalam bidang politik terhadap Kerajaan Bima.
2. Melakukan penyusunan data yang telah diperoleh dan telah dianalisis yang terkait dengan pengaruh perkembangan agama Islam dalam bidang politik terhadap Kerajaan Bima.
3. Melakukan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Bima merupakan salah satu dari 6 kerajaan yang pernah ada di Pulau Sumbawa yaitu Dompu, Sanggar, Tambora, Papekat, Sumbawa dan Bima. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima pada abad ke-19 meliputi bagian timur Pulau Sumbawa, Flores Barat (Manggarai) dan pulau-pulau kecil di Selat Alas dan sekitarnya. "Luas Kerajaan Bima yang telah tercantum dalam penjelasan kontrak Gubernur *Celebes en Onderhoorigheden* dengan Sultan Bima pada tahun 1886 seluruhnya adalah 156 mil persegi dengan rincian di Pulau Sumbawa ditambah dengan pulau-pulau kecil disekitarnya (kecuali Flores) adalah 71,5 mil persegi dan

di Pulau Flores seluas 84,5 mil persegi”. (Tawalinuddin Haris,1997:7).

Di Kerajaan Bima sebelum kedatangan agama Islam. Kerajaan Bima didiami oleh dua kelompok penduduk yaitu Dou Donggo (Orang Donggo) dan Dou Mbojo (orang Bima). Dou Donggo merupakan penduduk yang paling lama menempati daerah Bima. Maka dari itu mereka dianggap penduduk asli Bima. Dou Donggo bermukim di daerah pegunungan yang jauh dari pesisir, mereka memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda dari Dou Mboji (orang Bima). Dou Donggo itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yang didasarkan pada tempat mereka bermukim yaitu: Dou Donggo Ele (Orang Donggo Timur) dan Dou Donggo Ipa (Orang Donggo Seberang). “Daerah Kerajaan Bima didiami oleh dua kelompok penduduk yaitu Dou Donggo dan Dou Mbojo. Di dalam kelompok penduduk Dou Donggo juga masih terdapat dua kelompok penduduk berdasarkan daerah tempat mereka tinggal yaitu Dou Donggo Ele dan Dou Donggo Ipa” (Hilir Ismail, 2004:15).

Agama Islam masuk dan berkembang di Kerajaan Bima dibawa oleh para pedagang dari Jawa yang akan melakukan perdagangan ke Maluku yang terlebih dahulu singgah ke Bima untuk beristirahat. Para pedagang tersebut selama singgah di Kerajaan Bima selain melakukan perdagangan dan menambah perbekalan mereka, mereka juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang tinggal disekitar pelabuhan Bima Selain para pedagang yang membawa agama Islam ke Bima. Terdapat dua golongan dalam proses penyebaran agama Islam di Bima, pertama kali dilakukan oleh mubalig dari tanah Jawa yang bernama Sunan Prepen dan yang kedua dilakukan oleh para mubalig dari Sulawesi.

Islam masuk ke Bima dalam dua golongan. Golongan pertama terjadi sekitar tahun 1540-1550. Dalam gelombang pertama Islam dibawa masuk ke Pulau Sumbawa oleh para mubalig dan pedagang dari Demak. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1028 H (1620 M). Islam dibawa dibawa oleh pedagang dan mubalig dari Sulawesi yang terdiri dari orang Bugis, Lawu, Tallo, dan Bone (Ensiklopedi Islam, 1993:250). Pada saat agama Islam masuk, Kerajaan Bima

sedang mengalami kemelut yang berkepanjangan khususnya dalam bidang politik, hal ini diakibatkan karena ulah dari Salisi Ma Ntau Asi Peka yang menurut adat tidak berhak untuk menjadi seorang raja. Karena ambisi yang dimiliki oleh Salisi ini lah ia melakukan teror kepada penerus Kerajaan Bima yang syah.

Didorong oleh ambisi dan kepentingan pribadi yang tidak berpedoman pada adat, Salisi melakukan teror dengan membunuh Raja Samara dan Sarise bahkan putra mahkota yang tidak berdosa tidak luput dari kesadisan Salisi. Secara licik ia membunuhnya di padang rumput perburuan Wera. Kekejaman dan kesadisan Salisi tidak berakhir sampai di situ. Ia masih belum puas apabila putra mahkota La Ka’I masih ada di istana (M Hilir Ismail, 2004:45-46).

Usaha yang akan dilakukan oleh Salisi ini diketahui oleh putra mahkota yaitu La Ka’I yang kemudian melarikan diri bersama pengikutnya, La Ka’I dan pengikutnya menjadi pelarian politik. Dengan keadaan sedang dalam pelarian ini lah datangnya para mubalig Islam yang akan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Bima dan kemudian La Ka’I dan para pengikutnya menerima agama yang dibawa oleh para mubalig dari Sulawesi Selatan tersebut. Dengan bantuan masyarakat Bima yang telah memeluk agama Islam dan juga dibantu oleh Kerajaan Gowa yang telah mengirimkan para mubalig yang akan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Bima, La Ka’I berusaha merebut kekuasaan Kerajaan Bima yang pada dasarnya memang pewaris yang syah atas tahta Kerajaan Bima.

Dengan melakukan penyerangan terhadap Salisi yang dibantu oleh Kerajaan Gowa ini menyebabkan kekalahan bagi pihak Salisi. Kekalahan Salisi atas serangan La Ka’I yang dibantu oleh Kerajaan Gowa ini menjadikan La Ka’I kembali mendapatkan tahtanya atas Kerajaan Bima dan kemudian La Ka’I atau Ruma Ma Bata Wadu dinobatkan menjadi raja Kerajaan Bima, karena La Ka’I telah memeluk agama Islam maka La Ka’I merubah nama yang sesuai dengan nama Islam yaitu Abdul Kahir. Pada mulanya sebelum masuknya agama Islam Bima merupakan sebuah kerajaan yang menganut agama Hindu-Budha namun setelah mendapat

pengaruh agama Islam maka sistem pemerintahan Bima menjadi kesultanan.

Pengaruh agama Islam yang berkembang di Kerajaan Bima ini telah menjadikan Kerajaan Bima menjadi sebuah kesultanan. Agama Islam ini menjadi satu kekuatan ideologi bagi seorang raja untuk membangun suatu kekuatan ekonomi dan politik hal ini tidak terlepas dari para pedagang muslim yang menjadi agen penting dalam proses islamisasi di wilayah Kerajaan Bima. Dalam hal ini ulama yang menjadi agen dalam proses pengislamisasi Kerajaan Bima adalah Datuk Di Bandang dan Datuk Di Tiro. Datuk Di Bandang dan Datuk Di Tiro berusaha memperluas pengaruh agama Islam di Kesultanan Bima. Usaha yang dilakukan oleh Datuk Di Bandang dan Datuk Di Tiro untuk memperluas penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Kesultanan Bima ini dengan melakukan dakwah melalui kebudayaan “Kebudayaan asli Donggo terus dihidupkan dengan memasukkan jiwa Islam di dalamnya. Sehingga dikalangan Dou Donggo yang belum yang belum menerima Islam, berbondong-bondong masuk Islam” (M Hilir Ismail, 2004:108).

Setelah agama Islam telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah Bima, maka agama Islam yang berkembang di Bima mempengaruhi kehidupan di Bima Khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan seperti sistem pemerintahan yang pada mulanya terdiri dari Lembaga Hadat yang setelah mendapat pengaruh agama Islam Lembaga Sara Dana Mbojo mendirikan Lembaga Sara Hukum, hubungan kerjasama antara Kerajaan Bima dengan kerajaan disekitarnya, dan perluasan wilayah dakwah atau penyebaran agama Islam ke daerah-daerah yang menjadi taklukan Kesultanan Bima.

Kerajaan Bima pada masa Kesultanan ini mendapat pengaruh dari agama Islam. Pada mulanya Bima dipimpin oleh para Ncuhi dan kemudian setelah agama Hindu-Budha datang ke wilayah Bima maka sistem pemerintahannya pun berubah menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau Sangaji. Agama Islam masuk dan berkembang di wilayah Kerajaan Bima, sehingga semakin berkembangnya ajaran agama Islam di wilayah Bima menyebabkan

agama Islam pun ikut mempengaruhi segala bidang kehidupan di Kerajaan Bima. Pengaruh dari agama Islam terhadap sistem pemerintahan, Bima menjadi kesultanan, yang membedakan antara sistem pemerintahan kerajaan dan sistem pemerintahan kesultanan di Kerajaan Bima adalah bagaimana seorang raja itu memerintah.

Pada sistem pemerintahan kerajaan seorang raja adalah hukum itu sendiri. Ucapannya adalah hukum dan raja tidak bisa dihukum, dalam hal ini berarti raja memiliki hak istimewa dibandingkan individu lainnya dan berkuasa mutlak. Sedangkan sistem pemerintahan kesultanan seorang sultan bukanlah hukum melainkan pelaksana hukum dan pengawal hukum. Sultan tunduk kepada hukum Syariat Islam sama dengan masyarakat lainnya (Faisal, 2010:1).

Agama Islam juga mempengaruhi kehidupan politik di Kerajaan Bima yaitu dilihat dari Lembaga Sara Dana Mbojo yang pada masa kerajaan hanya terdapat Lembaga Hadat dan Majelis Tureli namun setelah mendapat pengaruh dari agama Islam Lembaga Sara Dana Mbojo berubah menjadi Majelis Lengkap.“ Lembaga Sara Dana Mbojo menjadi Majelis Lengkap dengan mendirikan Lembaga Sara Hukum. Sejak itu struktur pemerintahan terdiri dari Sara-sara yang dipimpin oleh Ruma Bicara, Sara Tua yang dipimpin oleh Sultan dan Sara Hukum dipimpin oleh Qadi” (M Hilir Ismail, 2004:75). Saat sistem pemerintahan di Kerajaan Bima dalam hal pengambilan keputusan Sultan dibantu oleh Ruma Bicara sedangkan pengambilan keputusan dalam hal pelanggaran agama Sultan dibantu oleh lembaga Sara Hukum yang dipimpin oleh seorang Qadi.

Majelis Syura atau Lembaga Sara ini merupakan lembaga yang membicarakan suatu masalah atau menetapkan suatu keputusan secara bersama-sama mengenai segala sesuatu yang di alami oleh umatnya. Dalam memutuskan suatu permasalahan lembaga Sara Hukum ini berpedoman pada ajaran-ajaran agama Islam. Menurut ulama fikih Siyasi dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ada beberapa alasan yang dikemukakan tentang pentingnya lembaga musyawarah tersebut :

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapat tentang masalah yang dihadapi dalam mengatur dan menentukan kebijakan Negara dan menetapkan perundang-undangan. Oleh karena itu, harus ada kelompok rakyat yang biasa diajak bermusyawarah dalam menentukan kebijakan dan menetapkan perundang-undangan.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah pada satu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mampu mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya mereka memiliki kemampuan intelektual dan wawasan yang berbeda-beda.
3. Musyawarah tersebut baru bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan dalam satu tempat, sudah pasti bahwa musyawarah tidak bisa dilakukan.
4. Kewajiban *amar makruf nahi mungkar* baru dapat terealisasi apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan umat pemerintah.
5. Kewajiban untuk menaati *ulil amri* (penguasa pemerintahan Islam) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah resmi.
6. Ajaran Islam menekankan terbentuknya lembaga musyarah(QS.42:38) (Abdul Azis Dahlan, 1996:1061).

Majelis Syura dalam sistem pemerintahan Kerajaan Bima ini bernama Sara Hukum yang dipimpin oleh seorang Qadi yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Imam, Khatib, Lebe, Cape Lebe, Bilal, dan Robo. Dalam bahas daerah Bima Sara Hukum ini disebut Sara Dana Mbojo atau Syara Tanah Bima yang berarti kelompok khusus untuk mengurus masalah keagamaan. Selain Lembaga Sara Hukum yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan agama. Dalam pengambilan keputusan suatu perkara agama, keputusan yang diambil oleh Lembaga Sara Hukum ini harus dengan persetujuan sultan. “ maka yang seperti hal orang yang berzina atau barang suatu

perbuatan yang takluk kepada zinah, yakni seperti laki-laki atau perempuan mengadukan hal salah seorang daripada keduanya kepada hakim, maka dihukumkan oleh hakim serta denda oleh kadi dengan kamu sekalian akan salah seorang daripada keduanya daripada barang yang patut perintah kamu sekalian yang memegang hukum agama “ (Henri Chambert Loir, 2012:67). Dalam menangani kasus yang berhubungan dengan pelanggaran agama Islam, lembaga Sara Hukum melakukan tugasnya yaitu menerima laporan dari pihak yang telah melakukan perzinahan, memberikan nasihat tentang hukuman perzinahan yang terdapat dalam hukum Islam, memberikan pertimbangan hukum agama, melakukan penghakiman terhadap orang yang melakukan perbuatan zina, contohnya:

Hijrat al-Nabi *salla'llahu alaihi wa sallama* seribu seratus tujuh puluh lima tahun , tahun Dalawal, sebelas hari bulan Jumadilakhir malam Kamis (Kamis, 7 Januari 1762), terdapat perempuan mengadukan hal kepada hakim bahwasannya ia sudah mufakat atau zinah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki mungkir, maka pengaduan perempuan itu diterima oleh hakim serta diperiksa, maka pengaduan itu disidangkan oleh kadi atau naibnya dengan segala temannya, maka laki-laki itu terbukti zinah, maka keduanya hendaklah dibanyak[k]an (dirajam) (Henri Chambert-Loir, 2012:63-64).

Lembaga Sara Hukum juga mengeluarkan ketetapan biaya bagi para pejabat dan masyarakat Kerajaan Bima yang akan menunaikan ibadah Haji, yaitu : Hijrat al-Nabi *salla'llahu alaihi wa sallama* seribu dua ratus dua puluh tahun, tahun Ha, pada dua puluh hari bulan Jumadilakhir hari Sabtu waktu asar (hari Ahad, 15 September 1805),dewasa itulah Yang Dipertuan Kita Wazir al-Muazam Bima bersimu Abdul Nabi ibn Hidir lagi bergelar Tureli Donggo mengeluarkan upah haji segala raja-raja dari pada pihak nasabnya yang telah bermufakat dengan Duli Yang Dipertuan Kita Sri Sultan Abdul Hamid yang mempunyai tahta kerajaan Bima. Syahdan bermula upah haji yang dipertuan kita Wazir al-Muazam Bima berismu Abdullah ibn Hidir dualapan puluh, dan paduka Demung Alas empat puluh, dan Datu Seran empat puluh, dan Raja Tureli

Bolo dualapan puluh, dan Raja Jeneli Woha dualapan puluh, dan paduka Datu Seran yang perempuan empat puluh, maka jumlahnya tiga ratus enam puluh real adanya (Henri Chambert-Loir, 2012:60).

Agama Islam sejak awal menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan suatu pemerintahan kesultanan, sehingga dalam hal ini para ulama ini menjadi bagian dari elite kekuasaan antara lain menjabat sebagai Qadi atau penghulu. “secara konseptual masuknya kepenghuluan dalam struktur kesultanan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi kesultanan terhadap lembaga kepenghuluan. Hal itu bisa pula dianggap sebagai masuknya agama dalam jajaran birokrasi. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas keagamaan diselenggarakan oleh birokrasi” (Restu Gunawan, 2012:93).

Pengaruh berkembangnya agama Islam di Kerajaan Bima ini juga mempengaruhi hubungan kerjasama antara Kerajaan Bima dengan kerajaan di sekitarnya, karena pengaruh dari masuknya agama Islam di Kerajaan Bima yang dibawa oleh pedagang dan mubalig dari Sulawesi Selatan maka terjalinlah hubungan kerjasama antara Kerajaan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama dengan Kerajaan Gowa dan Tallo.

Pada saat agama Islam masuk dan berkembang di Bima, didalamnya juga tersirat hubungan perdagangan antara Kerajaan Bima dengan daerah-daerah di Sulawesi Selatan, Lawu, Tallo dan Bone. Ruma Bumi Jara adalah pejabat setingkat Syahbandar di pelabuhan Sape, sehingga sebagai Syahbandar selain bertugas mengkoordinasikan kegiatan perdagangan di pelabuhan ia juga sebagai moderator antara para pedagang dengan penguasa setempat, yang dalam hal ini adalah Ruma Bicara sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya dalam struktur pemerintahan Kerajaan Bima (Tawalinuddi Haris, 1997:54).

Pada mulanya hubungan kerjasama antara Kesultanan Bima dengan Kerajaan Makassar diawali dari kedatangan para mubalig yang dikirim oleh Sultan Makassar untuk menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Bima. Berawal dari hubungan ini lah yang mendasari hubungan kerjasama antara

Kerajaan Bima dengan Kerajaan Makassar. Karena dilandasi oleh persamaan agama dan memiliki pertalian darah, maka hubungan politik antara Kesultanan Bima dengan Kerajaan Sulawesi Selatan dipererat dengan tali perkawinan antara putri para bangsawan Sulawesi Selatan dengan para penguasa di Kesultanan Bima.

Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk memperkuat loyalitas dan kesetiaan para penguasa Kesultanan Bima dengan putri raja-raja di Sulawesi Selatan. Hubungan kerjasama antara Kesultanan Bima dengan Sulawesi Selatan. “Setelah Kesultanan Bima meningkatkan kerjasama dengan Makassar hubungan semakin tegang, karena Belanda tidak senang terhadap Kesultanan Bima yang ikut membantu Makassar dalam melawan monopoli Belanda di Indonesia Timur. Situasi yang demikian akan menyebabkan Bima terlibat langsung dalam melawan Belanda” (M Hilir Ismail, 2004:70).

Selain menjalin kerjasama dengan raja-raja di Makassar, Kesultanan Bima juga telah menjalin kerjasama dengan raja atau sultan di sekitar wilayah Kesultanan Bima. Dalam Bo Sangaji Ka’I disebutkan bahwa

Ia Bima, ia Balanipa, jika orang Mandar datang ke Bima, datang ke rumahnya, datang kepada makanannya. Demikian lagi orang Bima jika datang ke Mandar, datang ke rumahnya, datang kepada makanannya. Musuhnya Mandar musuh Bima. Jikalau ada sukarnya Bima, jikalau boleh dibawanya berhutang sekalipun ditumpanginya datang memberi tahu ke Balanipa. Demikian lagi Balanipa, jikalau sukarnya Balanipa memberi tahu Bima. Hingga adanya orang Bima dengan orang Balanipa, dan kesudahannya setidaknya orang Bima dan orang Balanipa, Syahidnya Allah subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad salla’llahu alaihi wa sallama. Barang siapa melupakan kata ini dikutuk Allah dan rasul-nya. Adapun tatkala berjanji ini pada malam jumat kepada Sembilan hari bulan Jumadilakhir pada tahun Bahijrat al-Nabi salla’llahu alaihi wa sallama seribu tujuh puluh dualapan tahun, lima bulan tatkala Mengkasar dialahkan oleh Wolanda (Henri Chambert Loir, 2012:118).

Dari Bo di atas diketahui Kesultanan Bima juga telah menjalin kerjasama dengan

Kerajaan Balanipa yaitu kerajaan orang suku Mandar. Perjanjian yang dibuat oleh Kesultanan Bima dengan Kerajaan Balanipa ini dilakukan untuk menghindari dari incaran Belanda karena Kesultanan Bima tidak menyetujui ditandatanganinya Perjanjian Bongaya oleh Sultan Gowa, "Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, Sultan Abdul Kahir Sirajudin selain menghindari dari incaran Belanda, berusaha untuk menjalin kerjasama dengan raja atau sultan di seluruh wilayah Nusantara. Beliau bersama pengikutnya pergi ke Mandar guna menjalin kerjasama dengan Raja Balanipa melalui perjanjian tanggal 9 Jumadil Akhir 1078 H" (M Hilir Ismail, 2004:90).

Kerjasama yang coba dilakukan oleh Kesultanan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam bidang politik yaitu kerajaan-kerajaan tersebut berusaha bahu membahu dalam melawan monopoli atau dominasi Belanda yang berambisi ingin menaklukkan kedua kerajaan tersebut "Berkobarnya api peperangan antara Makassar dengan Belanda, mengharuskan Bima terlibat dalam peperangan. Karena antara Bima dengan Makassar diikat oleh persamaan politik, agama dan darah" (M Hilir Ismail, 2004:87).

Kerjasama antara Kesultanan Bima dengan Kerajaan Balanipa ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk bersama-sama melawan Belanda yang pada saat itu ingin menguasai Nusantara bagian Timur "Pada 9 hari bulan Jumadil Akhir pada tahun Ba 1078 Hijriah, tatkala Gowa ditaklukan oleh Belanda, Kerajaan Bima mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Balanipa" (Tawalinuddin Haris, 1997:54).

Dengan adanya pengaruh dari perkembangan agama Islam ini semakin mempererat hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Kesultanan Bima yang dilandasi persamaan keyakinan atau agama yaitu agama Islam, maka diharapkan Kesultanan Bima dapat semakin berkembang dan dapat bersaing dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar pemerintahan Kesultanan Bima, selain itu semakin dapat memperkokoh pertahanan keamanan di Kesultanan Bima.

Setelah menjalin kerjasama dengan kerajaan di sekitar Kerajaan Bima. Kerajaan

Bima kemudian ingin memperluas wilayah penyebaran agama Islam yaitu ke daerah yang telah menjadi wilayah taklukan Kerajaan Bima seperti Manggarai, Ende, Sumba, sampai ke Pulau Solor. Sebelum mengislamkan daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Bima, terlebih dahulu pemerintahan Kesultanan Bima berusaha mengislamkan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Kesultanan Bima "Sultan berusaha untuk meningkatkan kegiatan dakwah di daerah-daerah yang rakyatnya masih banyak belum menerima ajaran Islam. Untuk mengislamkan Dou Donggo Ipa, beliau melakukan dakwah melalui kebudayaan" (M Hilir Ismail, 2004:108).

Dengan melalui kebudayaan ini lah agama Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat di seluruh Kesultanan Bima, setelah seluruh wilayah Kesultanan Bima berhasil diislamkan maka kemudian kegiatan dakwah atau penyiaran agama Islam ini beralih ke daerah-daerah yang menjadi taklukan Kerajaan Bima "Sultan mengirinkan pejabat-pejabat Kerajaan Bima ke daerah Sumba dan Manggarai yang bertindak sebagai Na'ib sultan di wilayah itu yang sekaligus berkewajiban menyiarkan Islam" (Tawalinuddin Haris, 1997:43).

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang tidak membedakan antara bangsawan dan rakyat jelata semuanya sama. Dengan cara memperluas penyebaran agama Islam inilah menjadikan kedudukan Kesultanan Bima semakin kuat karena semangat kesatuan dan persatuan yang terjalin diantara pemeluk agama Islam. Dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan inilah yang menjadikan Kesultanan Bima sebagai pusat agama Islam di Nusantara bagian Timur.

Dari penjabaran hasil di atas, peneliti mencoba melihat bahwa pengaruh perkembangan agama Islam terhadap Kerajaan Bima dalam bidang politik ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan Kerajaan Bima yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan, selain itu Kesultanan Bima juga melakukan penyempurnaan lembaga Sara Dana Mbojo yaitu menjadi majelis lengkap. Selain berpengaruh terhadap sistem

pemerintahan Kerajaan Bima, agama Islam juga mempengaruhi hubungan kerjasama antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan disekitarnya yaitu bermula dari persamaan agama yang mereka anut kemudian kerjasama antara kedua kerajaan tersebut semakin berlanjut kepada kerjasama dalam bidang politik. Agama Islam juga membawa pengaruh bagi Kerajaan Bima dalam hal memperluas penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Bima. Usaha ini dilakukan agar agama Islam semakin tersebar luas keseluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Bima.

Menurut beberapa sumber yang diperoleh pengaruh perkembangan agama Islam terhadap Kerajaan Bima dalam bidang politik yang dapat dilihat dalam sistem pemerintahan Kerajaan Bima ini bahwa Kesultanan Bima yang awalnya adalah sebuah kerajaan maka berubah menjadi kesultanan hal ini disebabkan bahwa Kerajaan Bima telah mendapat pengaruh dari agama Islam yang kemudian menjadikan Kerajaan Bima menjadi sebuah kesultanan. proses islamisasi di Kerajaan Bima ini tidak terlepas dari peranan para Ulama yang menjadi media penyebaran agama Islam di Kerajaan Bima yang kemudian agama Islam ini semakin berkembang dan mengalami revolusi keagamaan yang menjadikan agama Islam berpengaruh terhadap lembaga-lembaga dalam struktur sosial, politik dan budaya setempat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Bima, agama Islam ini juga melakukan islamisasi terhadap lembaga peradilan yang terdapat di Kerajaan Bima yang pada mulanya lembaga peradilan yang berdasarkan adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Bima kemudian setelah mendapat pengaruh dari agama Islam mendirikan sebuah Lembaga yaitu Lembaga Sara Hukum yang dipimpin oleh Qadi. Penerapan hukum Islam ini tidak hanya melakukan penerapan terhadap pelaksanaan ibadah melainkan juga diterapkan dalam hal masalah-masalah *muamalat*, *munakahat* dan *uqubat*. Dibentuknya lembaga Sara Hukum di Kesultanan Bima hal ini dilakukan untuk menjadikan masyarakat Kesultanan Bima semakin menaati dan menjalankan peraturan-

peraturan dan syariat-syariat yang diajarkan dalam agama Islam sehingga agama Islam dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Kesultanan Bima.

Agama Islam yang berkembang di Kerajaan Bima ini telah mempengaruhi kehidupan Kerajaan Bima yaitu dalam bidang pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kerajaan-kerajaan yang telah mendapat pengaruh dari perkembangan agama Islam yang terdapat di Pulau Sulawesi dan Jawa yaitu di Kerajaan Gowa dan Kerajaan Mataram. Pengaruh yang dibawa oleh agama Islam juga mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada di dalam kerajaan tersebut yaitu dengan menambahkan atau membentuk lembaga yang mengurus tentang permasalahan yang berkaitan dengan agama Islam. lembaga yang dibentuk oleh Kerajaan di Sulawesi yang telah mendapat pengaruh dari agama Islam adalah Parewa Sara. Lembaga ini dibentuk selain untuk memastikan bahwa Syariat Islam dijalankan oleh masyarakat di kerajaan tersebut juga lembaga ini juga bertugas menjadi penasihat spiritual kerajaan.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong diantara sesama umat, selain itu agama Islam menjadi satu kekuatan ideologi bagi suatu kerajaan untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik, dilandasi dengan persamaan ideologi inilah maka kerajaan tersebut mencoba menjalin kerjasama dalam bidang politik yaitu dalam hal melawan monopoli Belanda yang berkeinginan untuk menguasai Nusantara bagian Timur. Kerajaan-kerajaan tersebut bersatu untuk melawan dominasi Belanda di Nusantara. Agama Islam yang berkembang di Kerajaan Bima ini selain membawa pengaruh dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Bima juga mempengaruhi hubungan Kerajaan Bima dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yaitu dapat dilihat dari hubungan antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Makassar yaitu dengan mengirimkan masyarakat dari Kerajaan Bima untuk belajar atau mendalami agama Islam di Kerajaan Makassar dan kemudian mereka kembali ke Kerajaan Bima untuk menyebarkan ajaran yang telah mereka peroleh dari guru mereka. Kerjasama

dalam hal pengajaran agama ini tidak hanya dilakukan oleh Kerajaan Bima dan Kerajaan Makassar saja, kerajaan-kerajaan di Jawa juga telah melakukan hubungan kerjasama dengan Kerajaan Ternate yang juga dilandasi dengan persamaan agama. Dengan dasar mengirim utusan untuk belajar agama Islam inilah hubungan kerjasama antar kerajaan tersebut semakin meningkat menjadi hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik.

Setelah mendapat pengaruh dari perkembangan agama Islam maka Kerajaan Bima menjadi sebuah kesultanan. Langkah yang diambil oleh Kesultanan Bima yang selanjutnya adalah memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Usaha yang dilakukan oleh Kesultanan Bima ini adalah dengan jalan mengirimkan ulama atau pejabat ke daerah yang akan mendapat pengaruh agama Islam atau dengan melalui jalan dakwah.

Perluasan wilayah dakwah ini selain dilakukan oleh para pembesar dan ulama dari Kerajaan Bima juga sebelumnya telah dilakukan oleh ulama dari Pulau Jawa. Pada mulanya proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para ulama dari tanah Jawa namun pada saat itu pemeluk agama Islam hanya sekedar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir saja kemudian seiring semakin banyaknya Kerajaan Islam di Indonesia maka upaya untuk semakin memperluas penyiaran agama Islam pun semakin besar.

Hal ini bermula dengan kedatangan pedagang dari kerajaan yang telah memeluk agama Islam yang singgah di suatu daerah yang kemudian mengajarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut dan dilanjutkan dengan pengiriman ulama ke daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam. karena agama Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup yang benar, berpikir dan mengamalkan dengan benar dengan demikian terjadilah proses saling mempengaruhi antar peradaban yang kemudian berlakulah sebuah hukum alam, siapa yang membawa cita-cita yang lebih tinggi dan lebih progresif akan lebih dominan. Dengan pedoman inilah maka kerajaan-kerajaan Islam ini ingin agama Islam semakin menyebar luas.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Bima membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan Kerajaan Bima khususnya dalam bidang politik, yaitu pada mulanya adalah kerajaan berubah menjadi kesultanan yang rajanya bergelar sultan selain itu juga terdapat penyempurnaan lembaga-lembaga dalam pemerintahan yaitu dengan menambahkan lembaga Sara Hukum. Penambahan lembaga Sara Hukum ini tidak hanya dilakukan oleh Kerajaan Bima, namun kerajaan-kerajaan yang mendapat pengaruh dari agama Islam juga telah melakukan penambahan lembaga pemerintahan yang bertugas menangani perkara-perkara dalam agama Islam seperti Kerajaan Gowa dan Kerajaan Mataram.

Selanjutnya pengaruh dari perkembangan agama Islam di Kerajaan Bima adalah Kerajaan Bima menjalin kerjasama dengan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Balanipa. Kerjasama ini bermula dari kerjasama dalam hal pengajaran agama, seperti para pemuda dari Kerajaan Bima belajar mendalami agama Islam di Kerajaan Gowa. Berawal dari kerjasama dalam pengajaran agama ini, kerjasama antar kerajaan tersebut meningkat menjadi kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi.

Pengaruh lain yang terjadi adalah Kesultanan Bima melakukan penyebaran agama Islam ke daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaannya, yaitu di daerah sebelah timur seperti Alor, Solor, Sawu, Sumba, Flores dan Komodo, yaitu dengan mengirimkan pejabat-pejabat yang bertugas sebagai pengganti sultan selain itu bertugas menyiarkan agama Islam di daerah-daerah tersebut. Kegiatan penyiaran agama Islam ini bermula dari kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa yang terlebih dahulu menyiarkan agama Islam namun pemeluknya agama Islam masih sebatas yang tinggal di pesisir pantai

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Suatu Pendidikan Praktik*. Jakarta : Bina Angkasa

- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gunawan, Restu. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Haris, Tawalinuddin. 1997. *Kerajaan Tradisional di Indonesia* : Bima. Jakarta : CV. Putra Sejati Raya.
- Ismail, Hilir. 2004. *Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram : Yayasan Adikarya IKAPI.
- Loir, Henri Chamber. 2010. *Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Loir, Henri Chambert. 2012. *Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salahuddin, H. Siti Maryam R , SH. 1992. *Bandar Bima*. Jakarta : Depdikbud.
- Matthew B. Miles dan A. Michael. H.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Nasir, Mohammad. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta : Indayu Press.
- Noorduyn, J. 1987. *Makasar and The Islamisation of Bima*. BKI.
- Notosusanto, Nugroho. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Yayasan Penerbit UI.
- Surachmad, Winarno.1995. *Pengantar Penelitian Ilmu Metode dan Teknik*. Jakarta : Gramedia.
- Suwondo, Bambang. 1977. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Tjandrasasmita, Uka ED. 1999. *Sejarah Nasional III*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zainudin. 2011. Asal Usul Masyarakat Bima (Dou Mbolo) (online). (http://emzoekombozo.freevar.com/index.php?page=2berita_baru&data=36 html, diakses 9 Desember 2012. Pukul 20.00 WIB)
- Faisal. 2010. Dakwah Politik Walisongo (online).(<http://faisalngoceh.blogspot.com/2010/10/dakwah-politik-walisongo-bukan-sekedar.html>, diakses Sabtu,16 Maret 2013 pukul 12.00 WIB)